Jurnal Cahaya Mandalika
https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM
Vol. 7, No. 1, 2026
e-ISSN: 2721-4796
pp. 22-28

# Pelestarian Lingkungan Berbasis Budaya Lokal Melalui PLA (Participatory Learning and Action)

**Rafly Akbar Rachman, Faiz Nafan Zaky**
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia
Email: raflyakbarar@gmail.com; faiznafanzaky@gmail.com

***Abstract***

*Indonesia's environmental crisis is shaped not only by ecological pressures but also by limited community involvement in natural resource management. This study aims to analyze how Participatory Learning and Action (PLA) can strengthen environmental conservation rooted in local culture. A qualitative approach was used through a literature review and case synthesis focusing on Subak in Bali, Sasi Laut in Maluku, and customary forest management among Dayak communities in Central Kalimantan. Data were analyzed thematically across customary institutions, knowledge integration, intergenerational learning, technology use, social inclusion, and implementation challenges. The synthesis shows that PLA strengthens communities' roles as conservation actors through participatory problem identification, resource mapping, joint planning, monitoring, and reflection. Integrating PLA with local wisdom also connects traditional knowledge with scientific information and technology, supports intergenerational knowledge transfer, and creates wider opportunities for women, youth, and vulnerable groups to participate. However, its effectiveness is influenced by economic pressures, uncertain legal recognition of customary territories, facilitator capacity, and the risk of cultural commodification. Therefore, culturally grounded PLA can be positioned as an adaptive, collaborative, and context-sensitive approach to environmental management, provided that policies recognize and support local institutions and knowledge systems.*

***Keywords:*** *Local Wisdom; Environmental Conservation; Community Participation; Participatory Learning and Action; Environmental Governance*

**Abstrak**

Krisis lingkungan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan ekologis, tetapi juga oleh terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Participatory Learning and Action* (PLA) dapat memperkuat konservasi lingkungan yang berakar pada budaya lokal. Pendekatan kualitatif digunakan melalui tinjauan pustaka dan sintesis kasus yang berfokus pada Subak di Bali, Sasi Laut di Maluku, dan pengelolaan hutan adat pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Data dianalisis secara tematis mencakup aspek kelembagaan adat, integrasi pengetahuan, pembelajaran antargenerasi, penggunaan teknologi, inklusi sosial, dan tantangan implementasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa PLA memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku konservasi melalui identifikasi masalah secara partisipatif, pemetaan sumber daya, perencanaan bersama, pemantauan, dan refleksi. Integrasi PLA dengan kearifan lokal juga menghubungkan pengetahuan tradisional dengan informasi ilmiah dan teknologi, mendukung transfer pengetahuan antargenerasi, serta menciptakan peluang lebih luas bagi perempuan, kaum muda, dan kelompok rentan untuk berpartisipasi. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, ketidakpastian pengakuan hukum atas wilayah adat, kapasitas fasilitator, dan risiko komodifikasi budaya. Oleh karena itu, PLA yang berlandaskan budaya dapat diposisikan sebagai pendekatan pengelolaan lingkungan yang adaptif, kolaboratif, dan peka terhadap konteks, dengan syarat kebijakan yang ada mengakui serta mendukung kelembagaan dan sistem pengetahuan lokal.

**Katakunci**: Kearifan Lokal; Konservasi Lingkungan; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola Lingkungan

## PENDAHULUAN

Degradasi lingkungan, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan tekanan terhadap sumber daya alam menunjukkan bahwa persoalan ekologis tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis. Pengelolaan lingkungan berlangsung dalam sistem sosial-ekologis yang melibatkan kepentingan, pengetahuan, kelembagaan, dan praktik masyarakat. Perspektif ketahanan sosial-ekologis menempatkan pembelajaran sosial, jejaring, kapasitas adaptif, dan kemampuan kelembagaan untuk merespons perubahan sebagai bagian penting dari keberlanjutan (Folke, 2006; Folke et al., 2005). Dalam konteks konservasi, keterlibatan masyarakat juga penting karena pengelolaan yang sepenuhnya dikendalikan dari luar komunitas berisiko mengabaikan kondisi lokal dan mengurangi rasa memiliki terhadap program konservasi (Berkes, 2007; Dawson et al., 2021).

Indonesia memiliki keragaman budaya dan ekosistem yang melahirkan berbagai praktik pengelolaan sumber daya berbasis pengetahuan lokal. Praktik tersebut antara lain sistem Subak di Bali, Sasi di Maluku, serta aturan dan nilai adat dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat Dayak. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga mengandung norma mengenai pemanfaatan, pembatasan, pengawasan, dan pemulihan sumber daya. Kajian tentang kearifan lokal di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat menjadi strategi konservasi apabila dipahami secara kontekstual dan disesuaikan dengan perubahan sosial-ekologis (Hasbiah, 2015; Nurhidayah & Pranata, 2021). Pada tingkat global, wilayah yang dikelola atau memiliki hak tenurial masyarakat adat juga beririsan secara signifikan dengan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (Garnett et al., 2018). Karena

https://doi.org/10.36312/JCM.v7i1.4790
Copyright©2026, Author (s)
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

itu, pengakuan terhadap pengetahuan dan kelembagaan lokal menjadi bagian penting dalam agenda konservasi dan pembangunan berkelanjutan (IPBES, 2019; CBD, 2019).

Participatory Learning and Action (PLA) berkembang dari tradisi pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai pihak yang belajar, menganalisis masalah, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan. Pretty (1995) menekankan pentingnya pembelajaran partisipatif dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian, sedangkan Chambers (1997) menegaskan perlunya perubahan relasi pengetahuan agar pengalaman masyarakat memperoleh posisi yang lebih kuat dalam proses pembangunan. PLA juga menekankan penggunaan teknik dialog, pemetaan, pengamatan langsung, analisis kelompok, visualisasi, dan refleksi untuk menghasilkan pembelajaran bersama (Chambers, 2007). Dalam pengelolaan lingkungan, partisipasi yang dirancang dengan baik dapat mempertemukan berbagai pengetahuan dan kepentingan sehingga keputusan lebih kontekstual (Reed, 2008).

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran dan pengelolaan kolaboratif dapat memperkuat kelembagaan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat. Social capital berupa kepercayaan, norma timbal balik, aturan bersama, dan jejaring sosial dapat mendukung tindakan kolektif dalam pengelolaan sumber daya (Pretty & Ward, 2001). Prinsip tersebut sejalan dengan adaptive co-management yang menggabungkan pembelajaran, kolaborasi, pemantauan, dan penyesuaian tindakan secara berkelanjutan (Armitage et al., 2009; Olsson et al., 2004). Dalam pengelolaan pengetahuan, pendekatan multiple evidence base menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah dapat dipertemukan tanpa menghilangkan integritas masing-masing sistem pengetahuan (Tengö et al., 2014; Tengö et al., 2017). Dengan demikian, PLA berpotensi menjadi ruang metodologis untuk menghubungkan pengetahuan lokal, sains, kelembagaan adat, dan teknologi.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan kajian. Literatur tentang PLA banyak membahas metode partisipasi dan pembelajaran, sedangkan kajian tentang kearifan lokal lebih sering menekankan fungsi budaya atau konservasi dari praktik tertentu. Hubungan antara proses PLA dan revitalisasi kelembagaan adat, integrasi pengetahuan, transfer antargenerasi, penggunaan media digital, serta inklusi kelompok rentan dalam konteks pelestarian lingkungan belum banyak disintesiskan dalam satu kerangka. Pada sisi lain, penelitian tentang tata kelola sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal dan Sasi menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik lokal sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, politik, kelembagaan, dan pengakuan hukum (Adnan & Satria, 2020; Pahleviannur, 2024; Layn, 2024). Studi mutakhir juga menunjukkan perlunya menjembatani aturan lokal dengan tata kelola formal melalui pengakuan kelembagaan dan pengaturan yang adaptif (Sawir et al., 2026; Suwarno et al., 2026).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PLA dalam pelestarian lingkungan berbasis budaya lokal dengan membandingkan temuan pada tiga konteks, yaitu Subak di Bali, Sasi Laut di Maluku, dan pengelolaan hutan adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Analisis diarahkan pada enam dimensi, yaitu revitalisasi kelembagaan adat, integrasi pengetahuan tradisional dan ilmu ekologis modern, transfer pengetahuan antargenerasi, pemanfaatan teknologi dan media digital, keterlibatan perempuan dan kelompok rentan, serta tantangan implementasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk merancang pelestarian lingkungan yang lebih partisipatif, adaptif, dan sesuai dengan konteks budaya setempat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka dan sintesis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, pola, hubungan kelembagaan, serta proses pembelajaran dan partisipasi yang muncul dalam praktik pelestarian lingkungan berbasis budaya lokal. PLA dipahami sebagai proses pembelajaran dan tindakan bersama yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi persoalan, memetakan sumber daya, menyusun pilihan tindakan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan refleksi terhadap hasilnya (Pretty, 1995; Chambers, 2007; Trianto, 2012). Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak diarahkan untuk mengukur efektivitas PLA secara statistik, tetapi untuk mengidentifikasi pola temuan yang konsisten di antara konteks kasus.

Unit analisis penelitian terdiri atas tiga konteks utama, yaitu Subak di Bali, Sasi Laut di Maluku, dan pengelolaan hutan adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemilihan ketiga konteks didasarkan pada keberadaan praktik pengelolaan sumber daya yang memiliki aturan lokal, mekanisme partisipasi, serta hubungan yang kuat antara nilai budaya dan lingkungan. Informasi mengenai Subak digunakan untuk melihat tata kelola air, musyawarah, dan pembagian peran; informasi mengenai Sasi digunakan untuk melihat pengaturan pemanfaatan sumber daya laut dan kelembagaan adat; sedangkan informasi mengenai masyarakat Dayak digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum adat, pengetahuan ekologis, dan perlindungan hutan (UNESCO, 2012; Usop & Rajiani, 2021; Pahleviannur, 2024).

Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, serta dokumentasi kasus yang relevan. Naskah awal juga menyebutkan wawancara dan observasi komunitas lokal, tetapi tidak memberikan rincian jumlah informan, waktu pengumpulan data, pedoman wawancara, atau lokasi observasi secara terukur. Oleh karena itu, pada tahap revisi ini temuan diperlakukan sebagai sintesis kualitatif berbasis dokumen dan informasi kasus yang tersedia, bukan sebagai generalisasi dari survei lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penambahan data empiris yang tidak tercantum dalam naskah awal.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi sumber yang membahas PLA, kearifan lokal, pengelolaan sumber daya, konservasi berbasis masyarakat, Subak, Sasi, dan masyarakat Dayak. Kedua, ekstraksi informasi yang berkaitan dengan bentuk partisipasi, kelembagaan, pengetahuan ekologis, pembelajaran, teknologi, inklusi sosial, dan tantangan. Ketiga, pengelompokan data ke dalam tema-tema analitis. Keempat, sintesis lintas kasus untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi. Analisis tematik mengikuti prinsip pengorganisasian data kualitatif ke dalam kategori dan tema yang bermakna (Hsieh & Shannon, 2005; Elo & Kyngäs, 2008). Keabsahan interpretasi diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan

dari artikel ilmiah, dokumen, dan kajian kasus. Kerangka analisis juga memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya bersama, pembelajaran sosial, dan tata kelola adaptif (Ostrom, 1990; Armitage et al., 2009).

Instrumen penelitian berupa matriks ekstraksi data yang memuat identitas sumber, konteks wilayah, bentuk kearifan lokal, aktor yang terlibat, mekanisme partisipasi, bentuk tindakan konservasi, hasil pembelajaran, dan tantangan. Matriks tersebut digunakan untuk menjaga konsistensi proses perbandingan antarkasus dan memudahkan penelusuran kembali hubungan antara temuan dan sumber rujukannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sintesis menunjukkan bahwa PLA berbasis budaya lokal bekerja melalui hubungan antara pengetahuan, partisipasi, kelembagaan, dan tindakan konservasi. Temuan utama bukan sekadar adanya kegiatan pelestarian, tetapi adanya proses yang membuat masyarakat terlibat dalam mendefinisikan masalah dan menentukan tindakan. Pola tersebut sejalan dengan gagasan bahwa partisipasi yang bermakna harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menganalisis realitasnya sendiri dan bukan hanya mengikuti keputusan pihak luar (Chambers, 1997; Reed, 2008). Dalam perspektif konservasi berbasis masyarakat, pendekatan dari bawah juga penting karena tujuan ekologis perlu dipadukan dengan kebutuhan sosial dan kelembagaan pada berbagai tingkat (Berkes, 2007; Dawson et al., 2021).

Tiga konteks yang dianalisis memperlihatkan bentuk kearifan lokal yang berbeda, tetapi memiliki prinsip yang serupa, yaitu adanya aturan pemanfaatan sumber daya, mekanisme pengambilan keputusan bersama, pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, serta norma yang mengatur perilaku. Subak mengatur distribusi air dan kegiatan pertanian melalui kelembagaan yang terhubung dengan sistem sosial dan keagamaan. Sasi mengatur waktu dan kondisi pemanfaatan sumber daya melalui larangan atau pembatasan tertentu. Pada masyarakat Dayak, hukum dan nilai adat mengatur hubungan masyarakat dengan hutan serta memberikan batas terhadap tindakan yang dianggap merusak. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa kearifan lokal dapat menjadi bagian dari tata kelola lingkungan apabila kelembagaan masyarakat diakui dan diberi ruang untuk beradaptasi (Hasbiah, 2015; Nurhidayah & Pranata, 2021).

### Revitalisasi Kelembagaan Adat dan Partisipasi

Temuan pertama menunjukkan bahwa PLA dapat memperkuat kelembagaan adat melalui proses musyawarah, pembagian peran, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam praktik Subak, tata kelola air tidak hanya menyangkut pembagian sumber daya, tetapi juga membutuhkan koordinasi antaranggota dan kepatuhan terhadap aturan yang disepakati. Sistem tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan sumber daya bergantung pada kapasitas kelembagaan untuk mengatur hubungan antaraktor (UNESCO, 2012; Wirawan, 2021). Prinsip ini sejalan dengan Ostrom (1990) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama memerlukan aturan yang dipahami, mekanisme pengawasan, dan kelembagaan yang mampu bekerja pada konteks lokal.

Pada konteks Maluku, Sasi menunjukkan peran lembaga adat dalam menetapkan kapan sumber daya boleh dimanfaatkan dan kapan harus dilindungi. Kajian Sasi menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan institusi pengelolaan sumber daya yang dapat bertahan ketika memiliki legitimasi sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi serta politik (Pahleviannur, 2024; Layn, 2024). Dengan PLA, forum lokal dapat digunakan untuk memetakan persoalan, menilai kondisi sumber daya, menyepakati tindakan, dan mengevaluasi hasil. Proses demikian memperkuat rasa memiliki karena keputusan konservasi tidak semata-mata datang dari pemerintah atau lembaga eksternal.

### Integrasi Pengetahuan Tradisional dan Pengetahuan Ilmiah

Temuan kedua menunjukkan bahwa PLA dapat menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan masyarakat mengenai musim, perilaku sumber daya, kondisi hutan, atau batas wilayah dapat menjadi dasar untuk merancang tindakan, sedangkan data ilmiah dan teknologi dapat membantu memperkuat proses pengamatan dan dokumentasi. Pendekatan multiple evidence base menekankan bahwa berbagai sistem pengetahuan tidak harus diseragamkan; masing-masing dapat memberikan bukti dan perspektif yang saling melengkapi (Tengö et al., 2014). Prinsip ini kemudian diperluas melalui gagasan bahwa proses mobilisasi, penerjemahan, negosiasi, sintesis, dan penerapan pengetahuan perlu melibatkan pemegang pengetahuan secara aktif (Tengö et al., 2017).

Dalam konteks Bali, pengetahuan lokal mengenai tata air dan kalender kegiatan pertanian dapat dipadukan dengan informasi iklim dan teknologi digital. Pada konteks pesisir Maluku, pengetahuan masyarakat tentang musim dan lokasi sumber daya dapat dilengkapi dengan pemetaan serta pencatatan hasil pengamatan. Pada masyarakat Dayak, pengetahuan mengenai fungsi hutan, tumbuhan, dan aturan adat dapat menjadi dasar untuk menetapkan wilayah yang perlu dilindungi. Penelitian Usop dan Rajiani (2021) menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Dayak memiliki fungsi dalam menjaga hutan sekaligus menghadapi tekanan perubahan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian, integrasi pengetahuan bukan sekadar menambahkan teknologi ke dalam praktik tradisional, tetapi membangun proses belajar dua arah yang menghargai pengalaman masyarakat.

### Transfer Pengetahuan Antargenerasi

Temuan ketiga berkaitan dengan transfer pengetahuan. PLA memberi ruang untuk belajar melalui praktik, cerita, demonstrasi, pemetaan, dan refleksi. Dalam konteks budaya lokal, proses tersebut dapat menghubungkan generasi tua yang memiliki pengalaman ekologis dengan generasi muda yang lebih akrab dengan media dan teknologi. Transfer ini penting karena kehilangan bahasa, praktik budaya, dan pengetahuan ekologis dapat berlangsung bersamaan dengan perubahan lingkungan. Hubungan antara keragaman biologis, budaya, dan bahasa menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan juga memiliki dimensi biokultural (Maffi, 2005).

Pembelajaran antargenerasi dapat dilakukan melalui sekolah alam, kegiatan komunitas, dokumentasi cerita, pemetaan wilayah, atau keterlibatan pemuda dalam pemantauan lingkungan. Pada masyarakat Dayak, nilai mengenai pohon yang tidak boleh ditebang dan aturan adat dapat dipelajari melalui interaksi dengan tetua. Pada masyarakat pesisir, aturan Sasi dapat dipelajari melalui keterlibatan dalam proses pembukaan dan penutupan wilayah pemanfaatan. Proses tersebut membuat budaya tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi pengetahuan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa pembelajaran sosial dan memori sosial merupakan komponen penting ketahanan sistem sosial-ekologis (Folke, 2006).

### Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital

Teknologi muncul sebagai sarana pendukung, bukan pengganti pengetahuan lokal. Dokumentasi digital, peta partisipatif, foto, video, dan media sosial dapat digunakan untuk menyimpan pengetahuan, memperluas komunikasi, serta memperkuat advokasi komunitas. Pendekatan PLA sendiri telah lama menggunakan pemetaan, diagram, transek, dan teknik visualisasi sebagai sarana agar masyarakat dapat menyajikan pengetahuan dengan caranya sendiri (Pretty, 1995; Chambers, 2007). Perkembangan teknologi digital memperluas kemungkinan tersebut, terutama dalam dokumentasi wilayah dan penyebaran informasi.

Namun, pemanfaatan teknologi perlu mempertimbangkan kepemilikan data dan hak komunitas. Dokumentasi pengetahuan adat yang dilakukan tanpa persetujuan dapat menimbulkan risiko komersialisasi atau penyalahgunaan. Karena itu, teknologi sebaiknya ditempatkan dalam tata kelola pengetahuan yang transparan dan disepakati bersama. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjembatani sistem pengetahuan secara adil, bukan menjadikan pengetahuan lokal hanya sebagai sumber data bagi pihak luar (Tengö et al., 2017).

### Perempuan, Kelompok Rentan, dan Modal Sosial

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah orang yang hadir, tetapi juga oleh siapa yang memiliki kesempatan berbicara dan memengaruhi keputusan. Pelibatan perempuan, pemuda, dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dapat memperluas informasi mengenai pangan, benih, pemanfaatan hasil hutan, pengelolaan pesisir, dan kebutuhan rumah tangga. Partisipasi yang inklusif dapat memperkuat social capital berupa kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan kerja sama (Pretty & Ward, 2001). Dalam konteks pengelolaan lingkungan, hal tersebut penting karena keputusan konservasi memiliki dampak yang berbeda terhadap kelompok masyarakat.

PLA menyediakan ruang untuk mengurangi dominasi aktor tertentu melalui diskusi kelompok, pemetaan partisipatif, dan pembagian peran. Akan tetapi, fasilitator tetap harus peka terhadap relasi kuasa. Partisipasi yang hanya bersifat konsultatif dapat menghasilkan keputusan yang tetap ditentukan oleh pihak yang lebih kuat (Reed, 2008). Oleh karena itu, keberhasilan PLA perlu dilihat dari kualitas proses pengambilan keputusan dan perubahan kapasitas masyarakat, bukan hanya dari banyaknya kegiatan yang dilakukan.

### Tantangan Implementasi dan Implikasi Kebijakan

Sintesis juga menemukan sejumlah tantangan. Pertama, tekanan industri ekstraktif dan kepentingan ekonomi dapat mengurangi ruang bagi aturan adat. Kedua, pengakuan hukum terhadap wilayah dan kelembagaan adat belum selalu berjalan konsisten. Ketiga, kapasitas fasilitator lokal dan dukungan pembiayaan dapat menentukan keberlanjutan kegiatan. Keempat, budaya berisiko dikomodifikasi sehingga nilai ekologisnya hanya diperlakukan sebagai atraksi. Kelima, perubahan sosial dan migrasi dapat mengurangi keberlanjutan transfer pengetahuan. Kajian mutakhir mengenai tata kelola Sasi menegaskan adanya kebutuhan untuk menghubungkan aturan lokal dengan kebijakan formal melalui pengakuan kelembagaan dan mekanisme tata kelola yang lebih adaptif (Sawir et al., 2026; Suwarno et al., 2026).

Implikasinya, kebijakan pelestarian lingkungan perlu bergerak dari pendekatan yang hanya mengatur masyarakat menuju pendekatan yang membangun kemitraan dengan masyarakat. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator pengakuan kelembagaan, penyedia dukungan teknis, dan penghubung antarlembaga. Perguruan tinggi dapat membantu dokumentasi, pemetaan, evaluasi, dan pengembangan teknologi yang sesuai kebutuhan komunitas. Lembaga masyarakat sipil dapat mendukung penguatan kapasitas serta advokasi. Pada tingkat komunitas, PLA dapat digunakan sebagai siklus identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, pemantauan, dan refleksi. Siklus ini selaras dengan prinsip adaptive co-management yang menempatkan pembelajaran dan penyesuaian sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya (Armitage et al., 2009; Olsson et al., 2004).

### Sintesis Lintas Kasus

Tabel 1 menunjukkan perbandingan praktik pelestarian pada tiga konteks. Meskipun bentuk kearifan lokal berbeda, ketiganya memperlihatkan adanya aturan lokal, partisipasi, pengetahuan ekologis, dan mekanisme pengawasan. Tabel 2 merangkum enam tema yang menjadi hasil sintesis penelitian. Secara konseptual, hubungan antartema dapat dipahami sebagai siklus PLA: identifikasi masalah dilakukan bersama, pengetahuan lokal dipetakan, rencana aksi disusun, tindakan dilakukan dan dipantau, hasil direfleksikan, kemudian pembelajaran digunakan untuk memperkuat kelembagaan dan diterapkan kembali pada persoalan berikutnya. Model ini merupakan sintesis konseptual dari temuan penelitian dan literatur PLA, bukan hasil pengukuran kuantitatif.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan utama PLA berbasis budaya lokal terletak pada kemampuannya menghubungkan dimensi ekologis dan sosial. Konservasi tidak dipahami hanya sebagai perlindungan fisik sumber daya, tetapi juga sebagai proses mempertahankan aturan, pengetahuan, hubungan sosial, identitas, dan kapasitas adaptasi masyarakat. Pandangan ini konsisten dengan kerangka konservasi yang menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor penting dalam pencapaian hasil konservasi

yang efektif dan adil (Dawson et al., 2021). Dengan demikian, PLA dapat menjadi pendekatan penghubung antara kearifan lokal, ilmu pengetahuan, kelembagaan adat, dan kebijakan publik.

**Tabel 1. Perbandingan Praktik Pelestarian Lingkungan Berbasis Budaya Lokal**

| Wilayah | Kearifan lokal | Mekanisme utama | Kontribusi terhadap pelestarian |
|---|---|---|---|
| Bali | Subak | Musyawarah, pengaturan distribusi air, dan pengaturan kegiatan pertanian | Menjaga tata kelola air, koordinasi antaranggota, dan keberlanjutan sistem pertanian |
| Maluku | Sasi Laut | Pembatasan waktu dan ruang pemanfaatan sumber daya serta pengawasan adat | Memberi kesempatan pemulihan sumber daya dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan lokal |
| Kalimantan Tengah | Hutan adat Dayak | Aturan adat, pengetahuan ekologis, larangan tertentu, dan pengawasan komunitas | Menjaga fungsi hutan, pengetahuan ekologis, dan identitas budaya |

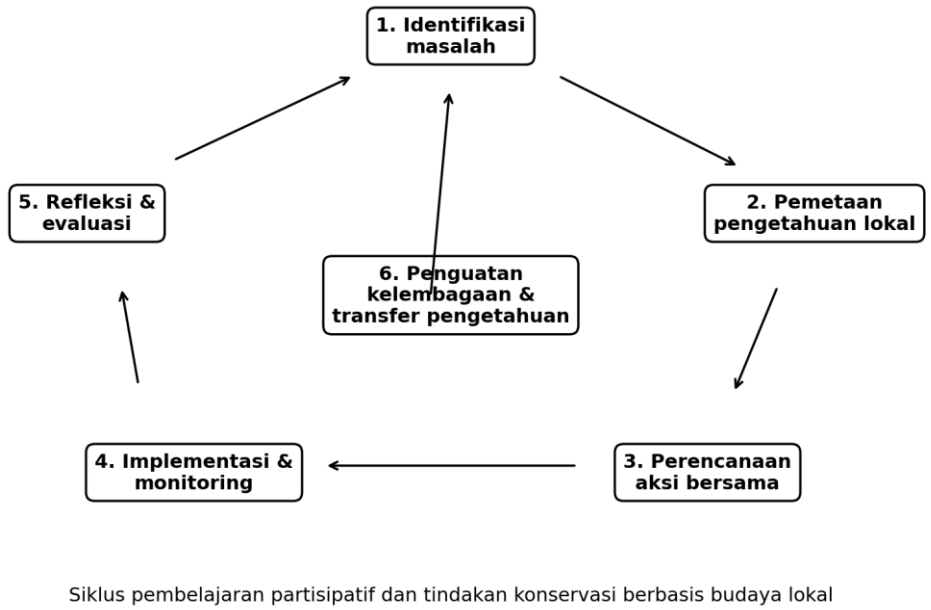
*Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Adnan dan Satria (2020), UNESCO World Heritage Centre (2012), Pahleviannur (2024), Usop dan Rajiani (2021), serta Wirawan (2021).*

**Tabel 2. Matriks Sintesis Tematik Hasil Penelitian**

| Tema | Bali | Maluku | Kalimantan Tengah |
|---|---|---|---|
| Kelembagaan dan partisipasi | Musyawarah dan koordinasi Subak | Kelembagaan Sasi dan aturan adat | Hukum adat dan otoritas komunitas |
| Integrasi pengetahuan | Pengetahuan tata air dan pertanian | Pengetahuan musim dan sumber daya pesisir | Pengetahuan hutan dan aturan adat |
| Transfer antargenerasi | Pembelajaran praktik pertanian dan tata air | Pembelajaran aturan Sasi dan pemanfaatan sumber daya | Pembelajaran nilai hutan dan hukum adat |
| Teknologi dan dokumentasi | Peluang pemetaan dan informasi iklim | Peluang pemetaan dan pencatatan sumber daya | Peluang dokumentasi wilayah dan pengetahuan |
| Inklusi sosial | Perluasan ruang dialog dan pembagian peran | Pelibatan kelompok pesisir dan generasi muda | Pelibatan pemuda dan kelompok masyarakat |
| Tantangan | Modernisasi dan perubahan tata kelola | Tekanan ekonomi dan pengakuan kelembagaan | Tekanan pembangunan dan perlindungan wilayah adat |

*Sumber: Sintesis penulis berdasarkan tema yang ditemukan dalam studi kasus dan literatur yang dianalisis.*

**Gambar 1. Model Sintesis Implementasi PLA dalam Pelestarian Lingkungan Berbasis Budaya Lokal**




*Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Pretty (1995), Chambers (1997, 2007), Trianto (2012), dan Tengö et al. (2014).*

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Participatory Learning and Action (PLA) dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat pelestarian lingkungan berbasis budaya lokal. Pada konteks Subak di Bali, Sasi Laut di Maluku, dan pengelolaan hutan adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, PLA mempertemukan proses partisipasi dengan aturan lokal, pengetahuan ekologis, pembelajaran antargenerasi, dan tindakan konservasi. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan tidak hanya ditentukan oleh adanya kegiatan partisipatif, tetapi oleh kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan refleksi.

PLA juga berpotensi memperkuat kelembagaan adat dan menghubungkan pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Pelibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dapat memperluas basis pengetahuan dan memperkuat modal sosial komunitas. Namun, penerapan PLA menghadapi tekanan ekonomi, keterbatasan pengakuan terhadap wilayah adat, kapasitas fasilitator yang tidak merata, serta risiko komersialisasi budaya. Oleh karena itu, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu membangun kemitraan yang mengakui hak, pengetahuan, dan kelembagaan masyarakat lokal. Penelitian lanjutan perlu menguji model sintesis ini melalui studi lapangan dengan informan, indikator partisipasi, dan ukuran perubahan ekologis yang terdokumentasi secara lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA


Adnan, M. A., & Satria, A. (2020). Local wisdom-based participatory governance in coastal resource management. Journal of Coastal Development, 23(1), 15–28.

Armitage, D. R., Plummer, R., Berkes, F., Arthur, R. I., Charles, A. T., Davidson-Hunt, I. J., Diduck, A. P., Doubleday, N. C., Johnson, D. S., Marschke, M., McConney, P., Pinkerton, E., & Wollenberg, E. K. (2009). Adaptive co-management for social–ecological complexity. Frontiers in Ecology and the Environment, 7(2), 95–102. https://doi.org/10.1890/070089

Berkes, F. (2007). Community-based conservation in a globalized world. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(39), 15188–15193. https://doi.org/10.1073/pnas.0702098104

Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications.

Chambers, R. (2007). Overview: Immersions: Something is happening. Participatory Learning and Action, 57.

Convention on Biological Diversity. (2019). Report of the Global Thematic Dialogue for Indigenous Peoples and Local Communities on the Post-2020 Global Biodiversity Framework. Secretariat of the Convention on Biological Diversity.

Dawson, N. M., Coolsaet, B., Sterling, E. J., Loveridge, R., Gross-Camp, N. D., Wongbusarakum, S., Sangha, K. K., Scherl, L. M., Phan, H. P., Zafra-Calvo, N., Lavey, W. G., Byakagaba, P., Idrobo, C. J., Chenet, A., Bennett, N. J., Mansourian, S., & Rosado-May, F. J. (2021). The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. Ecology and Society, 26(3), 19. https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change, 16(3), 253–267. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. Annual Review of Environment and Resources, 30, 441–473. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511

Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondizio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1, 369–374. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6

Hasbiah, A. (2015). Analysis of local wisdom as environmental conservation strategy in Indonesia. Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage, 1(1). https://doi.org/10.23969/sampurasun.v1i1.19

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services. IPBES Secretariat.

Layn, Y. Y. (2024). The local wisdom of the Sasi culture and green accounting (A qualitative approach from a sustainability perspective in Maluku Province). Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 12(6), 2337–2348. https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2949

Maffi, L. (2005). Linguistic, cultural, and biological diversity. Annual Review of Anthropology, 34, 599–617. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120437

Nurhidayah, L., & Pranata, Y. (2021). Implementasi nilai budaya dalam pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Komunitas, 7(1), 23–36.

Olsson, P., Folke, C., & Berkes, F. (2004). Adaptive comanagement for building resilience in social–ecological systems. Environmental Management, 34, 75–90. https://doi.org/10.1007/s00267-003-0101-7

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Pahleviannur, M. R. (2024). A systematic literature review of natural resource management and environmental conservation through SASI customary law in Indonesia. Journal of Indonesian Forestry Science, 1(1), 10. https://doi.org/10.47134/jifs.v1i1.3267

Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. World Development, 23(8), 1247–1263. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F

Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. World Development, 29(2), 209–227.

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological Conservation, 141(10), 2417–2431. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014

Sawir, M., Younus, M., Meiyani, E., & Kosasi, R. (2026). Local wisdom as the basis for environmental policy innovation with the practice of sea sasi and sago hamlets in Papua's ecological governance. Discover Environment, 4, 72. https://doi.org/10.1007/s44274-026-00601-x

Suwarno, E., Effendi, I., Matitaputty, J. K., Zainuri, & Sukma, R. D. (2026). Institutional model for integrating Sasi and local wisdom into Indonesia's national mangrove conservation policy. Biodiversitas, 27(4), d270409. https://doi.org/10.13057/biodiv/d270409

Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2014). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance: The multiple evidence base approach. AMBIO, 43(5), 579–591. https://doi.org/10.1007/s13280-014-0501-3

Tengö, M., Hill, R., Malmer, P., Raymond, C. M., Spierenburg, M., Danielsen, F., Elmqvist, T., & Folke, C. (2017). Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—lessons learned for sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability, 26–27, 17–25. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.005

Trianto. (2012). Model pembelajaran terpadu. PT Bumi Aksara.

UNESCO World Heritage Centre. (2012). Cultural landscape of Bali province: The Subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana philosophy. UNESCO.

Usop, S. R., & Rajiani, I. (2021). Indigenous Indonesian Dayak traditional wisdom in reducing deforestation. Indonesian Journal of Geography, 53(2). https://doi.org/10.22146/ijg.43546

Wirawan, I. M. (2021). Revitalisasi sistem Subak melalui pendekatan partisipatif. Jurnal Ketahanan Sosial, 14(3).